

	OMNICODE Journal (Omnicompetence Community Development Journal) ISSN. 2809-6177 Volume 5 Issue 2 June 2026 pages: 95-101 UrbanGreen Journal Available online at www.journal.urbangreen.ac.id	
---	--	---

Data Collection in Flood-Prone Housing Areas of Balangan and Tabalong Regencies

Hanny M Caesarina*

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah
Banjarmasin
Banjarmasin, Indonesia

Juniar I La Sinta

Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarmasin, Indonesia

*corresponding author: hanny.planarch@gmail.com

Keywords:

Balangan;
flood;
Participatory
Rural Appraisal;
prone area;
Tabalong.

ABSTRACT

Flooding is one of the most frequent natural disasters in South Kalimantan. To prevent future disaster-related crises, it is essential to gather data regarding the rehabilitation of homes for disaster victims. This community service identified housing units in disaster-prone areas by directly involving the community in verifying the collected data. The methodology was Participatory Rural Appraisal (PRA). Results indicate that in Balangan Regency, the initial count of housing units prior to community verification was 10,507; following verification, this number was adjusted to 3,965 units. The areas with the highest concentration of affected units were Awayan (29.3%), Juai (27.4%), and Halong (18.7%), while Paringin (1.4%) had the lowest. In Tabalong Regency, the initial count was 11,791 units, which was revised to 3,106 units after community verification. The areas with the highest concentration of affected units were Tanjung (39.77%), Muara Harus (22.86%), and Murung Pudak (11.62%), while Upau (1.61%) had the lowest.

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi di pulau Kalimantan yang menghadapi banyak ancaman bencana seperti banjir, kekeringan, kebakaran lahan, dan cuaca ekstrem. Salah satu jenis bencana yang beberapa tahun terakhir sering melanda provinsi Kalimantan Selatan adalah bencana banjir, longsor dan kebakaran lahan. Berdasarkan data klimatologi, curah hujan di provinsi Kalimantan Selatan bervariasi sepanjang tahun 2025 dengan curah hujan rata-rata 2.930,80 mm/tahun yang mana sebenarnya masih tergolong normal. Akan tetapi, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap bencana banjir maupun longsor yang kerap terjadi dalam kondisi intensitas hujan ekstrem.

Sebagaimana telah disebutkan dalam kebijakan nasional bahwa “pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana di daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana, 2007). Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kondisi lingkungan yang dapat membantu mitigasi bencana di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pendataan

lokasi rawan bencana dan terdampak bencana. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain melakukan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana agar dapat dilakukan mitigasi bencana sesuai dengan kondisi fisik wilayah (Caesarina & Rahmani, 2021; Somp, n.d.).

Dengan terdapatnya perumahan yang ada di lokasi rawan bencana maupun kejadian bencana, maka tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat tercapai. Salah satunya adalah menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau. Rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud adalah rumah yang memenuhi standar teknis, termasuk terpenuhinya kebutuhan infrastruktur lingkungan (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011).

Selama ini, banyak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditempati oleh masyarakat dan berada pada lokasi rawan bencana banjir maupun bencana lainnya. Dengan statusnya sebagai RTLH, kerentanan bangunan terhadap kerusakan akibat bencana banjir pun jauh lebih tinggi. Tidak jarang juga ditemui RTLH yang berada pada kawasan bantaran sungai yang mana banyak tersebar di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Caesarina & Rahmani, 2021; Kencana & Yuliasuti, 2017; Wulandari et al., 2022).

Pendataan perumahan di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program provinsi menjadi data utama yang diperlukan dalam perencanaan mitigasi bencana. Data-data tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan relokasi ke kawasan yang lebih aman, dengan mempertimbangkan akses ke tempat kerja, fasilitas umum dan sosial, kebutuhan lahan, serta status lahan saat menentukan lokasi yang sesuai. Apabila belum memungkinkan untuk dilakukan relokasi, maka data tersebut akan tetap menjadi acuan dalam merumuskan strategi ke depannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pendataan sebaran perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pengabdian masyarakat ini, kabupaten Balangan (Muhari, 2025) dan kabupaten Tabalong (Hendriyani, 2025; Rachman, 2021) dipilih sebagai lokasi kegiatan. Kabupaten Balangan menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah di tahun 2021, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong. Ribuan warga sempat dievakuasi akibat banjir bandang dan luapan sungai dengan ketinggian air yang mencapai atap rumah, sehingga Pemerintah daerah juga telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan pada saat itu. Sedangkan di kabupaten Tabalong, banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Tabalong. Luapan air merendam sejumlah titik permukiman wilayah utara, tengah, hingga selatan kabupaten, termasuk daerah perkotaan (Tahfazona et al., 2022; Unjang, 2014). Kedua kabupaten ini berada di dataran yang paling tinggi di provinsi Kalimantan Selatan sehingga kerap menjadi tolak ukur untuk kejadian bencana banjir.

Berkaitan dengan pendataan ini, masyarakat lokal menjadi pihak yang paling penting karena merupakan pihak yang langsung merasakan kejadian dan dampak dari bencana yang terjadi di daerah mereka. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan verifikasi dari data primer dan sekunder yang ada sebelumnya dengan pengalaman yang langsung dirasakan masyarakat lokal.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Balangan dan Tabalong dengan tujuan melakukan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana berdasarkan data sekunder dan data primer yang diverifikasi langsung dengan masyarakat lokal. Tahapan kegiatan terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan FGD (Focus Group Discussion) dengan stakeholder terkait.

Pengumpulan Data

Kegiatan diawali dengan pengumpulan data primer untuk mendapatkan data sebaran perumahan di tiap kabupaten, data kebencanaan (data kawasan resiko bencana dan data kawasan terdampak bencana) di tiap kabupaten. Pada tahapan pengumpulan data, dilakukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa setiap data yang didapatkan sinkron antara data yang didapatkan dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang merupakan data sekunder dan kondisi di lapangan. Pada setiap lokasi dilakukan wawancara dengan pihak kecamatan, kelurahan, hingga kepala Rukun Tetangga (RT) dan atau Rukun Warga (RW) di tiap desa. Berikut merupakan tahapan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan.

1. Konfirmasi data dan informasi data sekunder
2. Justifikasi dan klarifikasi kesesuaiannya di lapangan
3. Pendataan Perumahan (BNBA/By Name By Address) yang berada di Lokasi Kawasan Rawan Bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi.
4. Verifikasi kondisi eksisting perumahan terdampak dengan teknik *Participatory Rural Apraisal* (PRA). Secara umum PRA adalah sebuah metode perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama untuk mengidentifikasi masalah. Dalam hal ini masyarakat lokal di kabupaten Balangan dan Tabalong terlibat langsung dalam proses identifikasi dan verifikasi data kawasan resiko bencana dan terdampak bencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan data sekunder yang didapatkan memang bersesuaian dengan kondisi di lapangan. Tahapan kegiatan survey dan verifikasi dapat dilihat pada Gambar.1.



Gambar 1. Tahapan kegiatan secara umum

Setelah data didapatkan, dilakukan kompilasi dan pengolahan data primer hasil survei lapangan untuk dilakukan komparasi dengan data sekunder. Data-data ini disajikan dalam bentuk narasi, tabulasi, grafis dan pemetaan data spasial untuk menggambarkan kecenderungan pola yang terbentuk dari data yang diperoleh.

Analisis Data

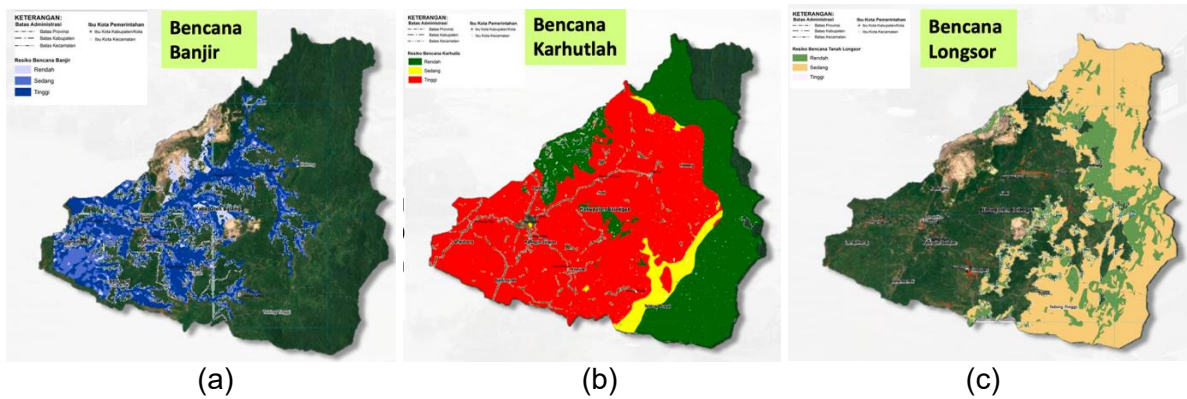
Hasil kompilasi data dianalisa dengan. analisis superimpose yang digabungkan dengan analisis triangulasi keragaman sumber informasi. Ada beberapa analisa yang dilakukan, antara lain analisa perumahan terdampak bencana, analisa perumahan resiko bencana, analisa perumahan rawan bencana, dan analisa kesesuaian terhadap Peraturan Daerah nomor 24 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan dan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong.

FGD (*Focus Group Discussion*)

Kegiatan FGD dilakukan untuk menjaring masukan atas hasil analisa yang telah dilakukan dan merupakan verifikasi ke-dua dari seluruh data yang telah didapatkan. Hal ini juga merupakan elemen krusial dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, karena masukan dari pemangku kepentingan terkait seperti dinas perumahan dan permukiman, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

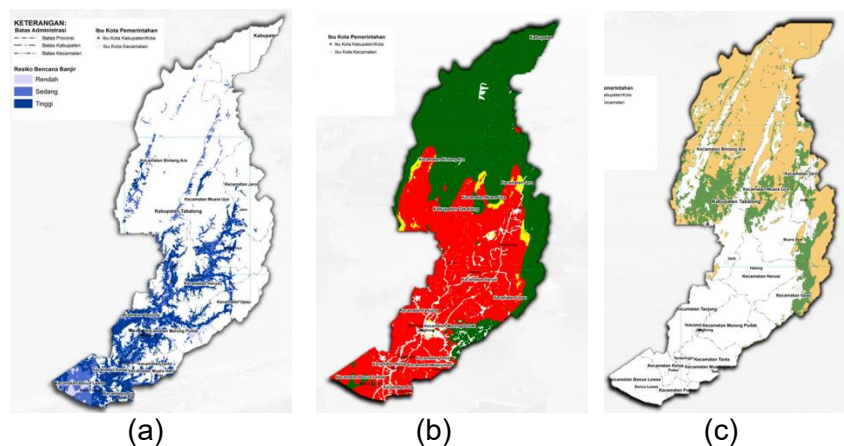
HASIL DAN PEMBAHASAN

Data sekunder digunakan sebagai data awal untuk mengidentifikasi sebaran kawasan yang termasuk dalam resiko bencana. Pada kabupaten Balangan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1, daerah rawan bencana banjir paling tinggi di Kecamatan Juai sekitar 4.029 Ha atau 30% dari Total Wilayah terdampak Banjir di Balangan. Daerah Rawan Bencana Karhutlah paling Tinggi di Kecamatan Juai sekitar 11.109 Ha atau 27% dari Total Wilayah terdampak Karhutlah di Balangan. Daerah Rawan Bencana Banjir Paling Tinggi di Kecamatan Halong Longsor sekitar 734,39 Ha atau 91% dari Total Wilayah terdampak Longsor di Balangan. Total Kawasan Rawan Bencana yang terdapat di Kabupaten Balangan (Klasifikasi Tinggi) yaitu 55.236 Ha dari total luas wilayah 182.812 Ha. Berdasarkan Data Rawan Bencana Sebaran Lokasi Rawan bencana Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Balangan berada di Kecamatan Juai dengan luasan Rawan Bencana yaitu 15.138 Ha atau 27,4% dari total luasan rawan bencana klasifikasi tinggi.



Gambar 2. (a) sebaran bencana banjir di Kabupaten Balangan; (b) sebaran bencana Karhutlah di kabupaten Balangan; (c) sebaran bencana longsor di Kabupaten Balangan

Daerah Rawan Bencana Banjir paling tinggi di Kecamatan Banua Lawas sekitar 3.148 Ha atau 18% dari Total Wilayah terdampak Banjir di Tabalong. Daerah Rawan Bencana Karhutlah Paling Tinggi di Kecamatan Banua Lawas sekitar 13.113 Ha atau 30% dari Total Wilayah terdampak Karhutlah di Tabalong. Daerah Rawan Bencana Longsor Paling Tinggi di Kecamatan Jaro sekitar 541,65 Ha atau 77% dari Total Wilayah terdampak Longsor di Tabalong. Total Kawasan Rawan Bencana yang terdapat di Kabupaten Tabalong (Klasifikasi Tinggi) yaitu 62.094 Ha dari total luas wilayah 347.270 Ha. Berdasarkan Data Rawan Bencana Sebaran Lokasi Rawan bencana Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Tabalong berada di Kecamatan Banua Lawas dengan luasan Rawan Bencana yaitu 16.261 Ha atau 26,19%. Peta sebaran kerawanan bencana pada kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Gambar.2 di bawah ini.



Gambar 3. (a) sebaran bencana banjir di Kabupaten Tabalong; (b) sebaran bencana Karhutlah di kabupaten Tabalong; (c) sebaran bencana longsor di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan data peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang didapatkan, kemudian dilakukan analisa superimpose dengan data lokasi kejadian bencana periode tahun 2021-2025. Setelah proses ini dilakukan, didapatkan delineasi sebaran kawasan perumahan bencana yang tersebar di beberapa desa dan RT yang difinalisasi dengan verifikasi langsung ke masyarakat lokal.

Tabel 1. Identifikasi Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Balangan

Variabel Delineasi Perumahan di Kawasan Rawan Bencana	Kabupaten Balangan (sebelum verifikasi)	Kabupaten Balangan (sesudah verifikasi dengan Teknik PRA)
Luas Wilayah	396,53 Ha	396,53 Ha
Jumlah kecamatan kawasan bencana	7	7
Jumlah kelurahan/desa	28	32
Jumlah RT	100	101
Jumlah unit bangunan	10. 507 unit	3.965 unit
Jumlah jiwa/KK yang terdampak bencana	-	3.892 layak huni dan 73 tidak layak huni 12.791 jiwa/4.208 KK

Sumber: Hasil Analisa dan Verifikasi Data, 2026

Dari hasil verifikasi, didapatkan beberapa penyesuaian data. Pada kabupaten Balangan, kecamatan Awaran merupakan wilayah terluas yang terdampak bencana sebanyak 1.162 unit rumah atau sekitar 29.3% dari total unit rumah yang terdampak bencana di Balangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 3.965 unit rumah yang sudah diverifikasi, didapatkan bahwa 3.892 unit rumah sebagai rumah layak huni dan 73 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Penentuan Layak Huni atau Tidak Layak Huni ditentukan berdasarkan ketentuan “Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Direktorat Rumah Swadaya berdasarkan faktor keselamatan, kecukupan ruang, bahan bangunan, dan kesehatan. Selain itu juga terdapat ada 2.233 rumah yang termasuk kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan 1.713 rumah non-MBR.

Tabel 2. Identifikasi Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tabalong

Variabel Delineasi Perumahan di Kawasan Rawan Bencana	Kabupaten Balangan (sebelum verifikasi)	Kabupaten Balangan (sesudah verifikasi dengan Teknik PRA)
Luas Wilayah	340,61 Ha	396,53 Ha
Jumlah kecamatan kawasan bencana	6	7
Jumlah kelurahan/desa	15	24
Jumlah RT	66	86
Jumlah unit bangunan	11.791 unit	3.106 unit
Jumlah jiwa/KK yang terdampak bencana		

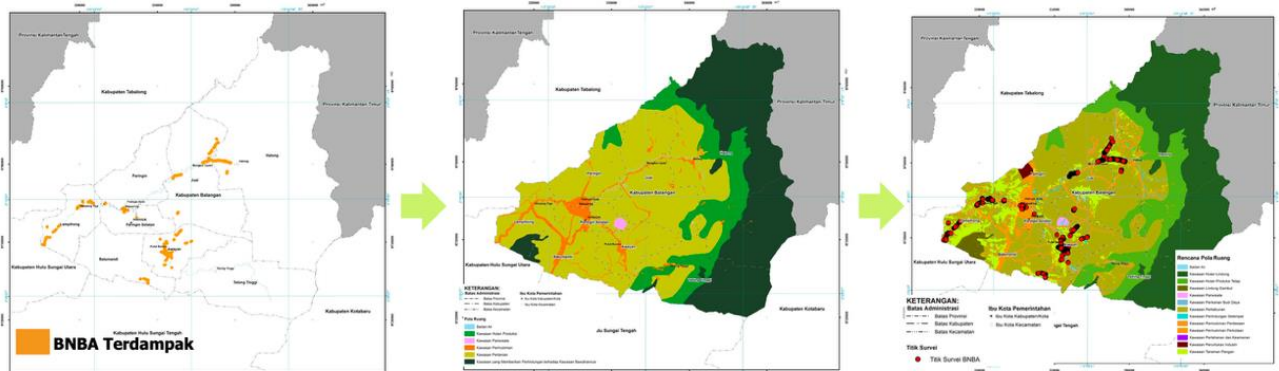
Sumber: Hasil Analisa dan Verifikasi Data, 2026

Dari hasil verifikasi data dengan masyarakat lokal (Gambar 1), didapatkan beberapa penyesuaian data. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat kerap terjadi ketidaksesuaian data sekunder dan data primer. Pada kabupaten Tabalong, kecamatan Murung Pudak merupakan wilayah terluas yang terdampak bencana sebanyak 1.162 unit rumah atau sekitar 29.3% dari total unit rumah yang terdampak bencana di Balangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 3.965 unit rumah yang sudah diverifikasi, didapatkan bahwa 3.892 unit rumah sebagai rumah layak huni dan 73 unit rumah tidak layak huni. Penentuan Layak Huni atau Tidak Layak Huni ditentukan berdasarkan Ketentuan “Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Direktorat Rumah Swadaya berdasarkan faktor keselamatan, kecukupan ruang, bahan bangunan, dan kesehatan.



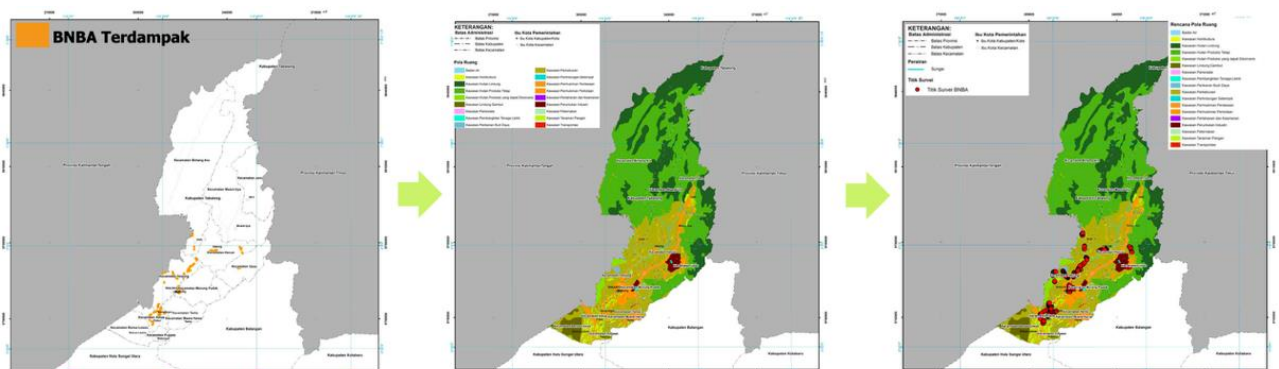
Gambar 4. Proses verifikasi data dengan Masyarakat Lokal

Data-data yang telah didapatkan, hasilnya kemudian dipaparkan dan dievaluasi bersama dalam *Forum Group Discussion* (FGD) untuk kemudian mendapatkan masukan dari stakeholder terkait antara lain seperti dinas perumahan dan permukiman, serta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Hasil FGD menunjukkan bahwa pada data-data yang dikumpulkan disepakati telah sesuai dengan kondisi kebencanaan di kabupaten Balangan dan kabupaten Tabalong, bahkan melebihi dari data sekunder yang didapatkan di awal. Sehingga pada proses selanjutnya data yang didapatkan disandingkan dengan data pola ruang sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Gambar 5).



Gambar 5. Kesesuaian perumahan terdampak dengan pola ruang RTRW Kabupaten Balangan

Berdasarkan hasil kesesuaian perumahan terdampak dengan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kabupaten Balangan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2, kondisi sudah sesuai dengan Ketentuan Umum Zonasi (KUZ) RTRW untuk permukiman baik permukiman perkotaan ataupun permukiman perdesaan sebesar 3.716 Unit atau 93,72% dari total unit wilayah studi. Sedangkan untuk peruntukkan selain bukan permukiman adalah sebesar 249 Unit atau 6,28% dari total unit BNBA (*By Name By Address*) di Wilayah Studi Kabupaten Balangan. Sebesar 6,28% menunjukkan bahwa sebagian kecil kawasan permukiman eksisting berada di luar zona yang direncanakan sebagai peruntukkan permukiman.



Gambar 6. Kesesuaian perumahan terdampak dengan pola ruang RTRW Kabupaten Tabalong

Hasil kesesuaian perumahan terdampak dengan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kabupaten Tabalong sebagaimana dapat dilihat pada Gambar.6, lokasi perumahan terdampak sudah sesuai dengan ketentuan umum zonasi untuk permukiman baik permukiman perkotaan ataupun permukiman perdesaan sebesar 2.922 Unit atau 94,08% dari total unit wilayah studi sedangkan. Adapun peruntukkan selain bukan permukiman adalah sebesar 184 Unit atau 5,92% dari Total Unit BNBA (*By Name By Address*) di Wilayah Studi Kabupaten Tabalong. Sehingga dari segi tata ruang dapat disimpulkan bahwa perumahan yang terdampak bencana berada pada pola ruang permukiman.

Dapat disimpulkan bahwa Jumlah Unit Rumah BNBA di kabupaten Balangan sebelum dilakukan verifikasi sebanyak 10.507 Kelurahan/Desa, Setelah dilakukan verifikasi dengan masyarakat menjadi 3.965 Unit. 3 Lokasi terdampak yang paling dominan sebarannya adalah Awayan (29,3%), Juai (27,4%), Halong (18,7%) dan yang paling sedikit terdampak di Paringin (1,4%) Jumlah Unit Rumah BNBA di kabupaten Tabalong sebelum dilakukan verifikasi sebanyak 11.791 Kelurahan/Desa. Setelah dilakukan verifikasi dengan masyarakat menjadi 3.106 Unit. 3 Lokasi terdampak yang paling dominan sebarannya adalah Tanjung (39,77%), Muara Harus (22,86%), Murung Pudak (11,62%) dan yang paling sedikit terdampak di Upau (1,61%).

KESIMPULAN

Kesiapan masyarakat menghadapi bencana banjir menjadi hal yang sangat penting, karena kejadian bencana merupakan hal yang tidak dapat dihindari setiap tahunnya. Masyarakat yang sudah terikat dengan lokasi tempat tinggalnya cenderung enggan untuk direlokasi dengan pertimbangan kesulitan adaptasi dengan budaya tempat tinggal yang baru sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis untuk masyarakat lokal. Hal ini harus menjadi pertimbangan untuk pemerintah daerah di kabupaten Balangan dan Tabalong dalam menentukan lokasi relokasi apabila memang diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Tabalong, khususnya dinas terkait seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Balangan dan Tabalong.

REFERENSI

- Caesarina, H. M., & Rahmani, D. R. (2021). Keterkaitan Permukiman Tepi Sungai dan Ruang Terbuka Hijau- Biru terhadap Kerentanan Bencana Banjir di Kota Kasongan Kalimantan Tengah. *Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana*, 2, 88–92.
- Hendriyani, I. (2025). *Air Sungai Tabalong Naik 9,75 Meter, Banjir Bergerak ke Wilayah Tengah dan Selatan*. <https://tvtabalong.com/air-sungai-tabalong-naik-975-meter-banjir-bergerak-ke-wilayah-tengah-dan-selatan/>
- Kencana, A. D., & Yuliasuti, N. (2017). Penilaian Bentuk Adaptasi Masyarakat Terhadap Hunian di Kawasan Rawan Rob dan Banjir Kelurahan Kemijen. *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(2), 186–196.
- Muhari, A. (2025). *Banjir di Kalimantan Selatan Berangsur Surut*. <https://bnpb.go.id/berita/banjir-di-kalimantan-selatan-berangsur-surut>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 27, 3 (2007).
- Rachman. (2021, November 9). *Banjir Tabalong, Pemprov Kalsel bagikan 1.500 Paket Makanan*. 2.
- Sompa, A. T. (n.d.). *MODEL KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN*. Retrieved July 8, 2026, from <https://repositori.dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/33156>
- Tahfazona, R., Yusran, F. H., Kadir, S., & Saidy, A. R. (2022). Tata Guna Lahan dan Kejadian Banjir di Kawasan Perkotaan Kabupaten Tabalong. *EnviroScienteeae*, 18(2), 46–53.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pub. L. No. 1, 136 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>
- Unjang, D. H. (2014). Tabalong River Flood Control At Tabalong District South Kalimantan. *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, 3(02), 37–42.
- Wulandari, N., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan Di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 336–353.